

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah ditulis di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan sebagai perpanjangan tangan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dalam melakukan pendampingan dengan dilakukannya pembinaan serta menjadi mediator bagi PNS yang mengajukan perceraian setelah dilakukan proses pembinaan di instansinya dan menertibkan administrasi perceraian PNS. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya berwenang mengeluarkan Surat rekomendasi hasil sidang cerai yang kemudian diteruskan ke Walikota untuk ditandatangani. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan proses mediasi bagi PNS yang mengajukan permohonan perceraian dengan baik di Kota Yogyakarta. Pembinaan PNS merupakan salah satu tugas dan wewenang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu sebagai mediator bagi PNS yang mengajukan perceraian. Bila dilihat dari data BKPSDM Kota Yogyakarta, kasus perceraian PNS di Kota Yogyakarta mengalami

perubahan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 terdapat 21 PNS, tahun 2021 terdapat 10 PNS, tahun 2022 terdapat 8 PNS, pada 3 tahun tersebut angka perceraian PNS mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 terdapat kenaikan yaitu sebanyak 10 PNS. Dari 49 PNS yang bercerai, hanya 1 pasangan yang berhasil dirujuk. Hal ini menunjukkan keberhasilan mediasi oleh BKPSDM Kota Yogyakarta sangat minim sehingga perbandingan jumlah perceraian PNS dengan keberhasilan mediasi menunjukkan peran BKPSDM Kota Yogyakarta belum terlalu efektif dalam menekan tingkat perceraian PNS di Kota Yogyakarta.

2. Kendala BKPSDM Kota Yogyakarta dalam membina dan memediasi PNS yang ingin bercerai adalah pasangan tidak mau dipertemukan lagi, jarak antara kedua pasangan, keterbukaan pasangan dan kerelaan pasangan untuk dibina. Perceraian yang terjadi tentunya mempunyai alasan yang mendasari PNS memilih bercerai daripada mempertahankan perkawinannya, secara umum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian PNS di Kota Yogyakarta yaitu ketidakcocokan berkepanjangan, kekerasan fisik dan adanya pihak ketiga.
3. Upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian PNS di Kota Yogyakarta adalah melakukan sosialisasi dengan mengundang Badan Kepegawaian Negara untuk memaparkan aturan mengenai aturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, BKPSDM Kota Yogyakarta juga memiliki perpanjangan tangan

yaitu Kasubag Umum Kepegawaian di masing-masing instansi untuk mengkomunikasikan aturan-aturan yang ada dan BKPSDM Kota Yogyakarta mensosialisasikan kepada generasi Z yang sudah diterima menjadi PNS mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta selaku instansi daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan mempunyai kewenangan dalam pembinaan perceraian PNS harus dapat meningkatkan dan mengembangkan fungsi dan peran BKPSDM Kota Yogyakarta secara optimal dalam memberikan pembinaan kepada PNS agar tingkat perceraian yang dilakukan PNS di Kota Yogyakarta semakin menurun.
2. Pegawai Negeri Sipil sebagai contoh dan teladan masyarakat harus selalu menjaga ego dalam menghadapi masalah kehidupan rumah tangga perkawinan dengan selalu menjaga keutuhan rumah tangganya dan di usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1983. *PP No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Pelaksanaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmat Alyakin Dakhi, 2022, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Sarnu Untung.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT Media Sarana Press, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Siti Soetami, 1990, *Hukum Administrasi Negara II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soengeng Prijodarminto, 1993, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36)

## **JURNAL**

Lasri Nijal, dkk, 2022, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan", *Jurnal Das Solen*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022, Universitas Islam Negeri SUSKA, Riau.

Sandy Ari Wijaya, dkk, 2022, "Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021", *Jurnal Mentari Publika*, Volume 02 Nomor 02, 2022, STIA Muhammadiyah Selong.

Ujang Wardi, 2021, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil ( Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)", *Indonesian Journal of Religion and Society*, Volume 3 (2), 80-90, November 2021, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.

## **PENELITIAN HUKUM**

Handoko, 2012, "*Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mencegah Perceraian*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mauryzka Khouirunnisa Mulyawan, "*Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil*". Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Moch Hilaluddin, 2021, "*Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)*". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **INTERNET**

BKPSDM Kota Yogyakarta, 2023, Perjalanan BKPSDM Kota Yogyakarta Melintasi Waktu Menuju Masa Depan, dalam <https://bkpp.jogjakota.go.id/page/index/17> diakses 20 September 2023

BKPSDM Kota Yogyakarta, 2023, *Visi dan Misi*, dalam <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses 20 september 2023

Jogjakota.go.id: “Gambaran Umum Kota Yogyakarta” <https://www.jogjakota.go.id/pages/gambaran-umum-kota-yogyakarta> diakses tanggal 10 April 2023.

